

## Kesiapan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumbu Filosofi Yogyakarta berbasis Cultural Heritage Management

Y.B. Revolvere Kelana Ashoka<sup>1\*</sup>, Nur Adzim Aminuddin<sup>1</sup>, Shintia Putri Fibrilawati<sup>1</sup>, Hana Syahmina Bachri<sup>1</sup>, Rehuella Sarlotha Modjo<sup>2</sup>, dan Fahmi Prihantoro<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Arkeologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada

<sup>2</sup>Program Studi Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada

\*Corresponding author: [yohanes.de3103@mail.ugm.ac.id](mailto:yohanes.de3103@mail.ugm.ac.id)

### ABSTRACT

*The Philosophical Axis of Yogyakarta has been designated as a world heritage by UNESCO. The nomination process has been criticized for neglecting community engagement. There is an assumption that the community will not be ready to play an active role in preserving the significant values of the Philosophical Axis. In fact, the community participation is the key to the conservation success. This paper presents the results of a study on the perception and level of readiness of the community around the Philosophical Axis area to take active participation in managing this world heritage. The study was conducted using the Cultural Heritage Management approach. Data collection was carried out by in-depth interviews, FGDs, and observations involving a number of resource persons living within the Sumbu Filosofi area. The results demonstrate that the community tend to understand the meaning of the Philosophical Axis and efforts to preserve it, although there are still some who do not understand it well. This shows that the dissemination of the significance values of the Philosophical Axis and its management efforts has not been effective. From the level of readiness, the community in the Philosophical Axis Area has only reached the initiation level. The community knows the positive impact of the establishment of the Philosophical Axis that can improve the economy and welfare of the community. However, they are not truly ready to be involved in its preservation and management. The government must optimize the policies and management programs of the Philosophical Axis in order to create synergy between the government and the community.*

**Keywords:** *The Cosmological Axis of Yogyakarta; Cultural heritage management; Community readiness; Sustainable management*

### ABSTRAK

Sumbu Filosofi Yogyakarta telah ditetapkan sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Proses pengajuan ini dinilai kurang memperhatikan keterlibatan masyarakat. Karena itu, ada anggapan bahwa masyarakat belum siap untuk berperan aktif dalam pelestarian nilai penting Sumbu Filosofi. Padahal, masyarakat dianggap memegang peran penting dalam pelestarian yang berkelanjutan. Tulisan ini memaparkan hasil kajian tentang persepsi dan tingkat kesiapan masyarakat di sekitar Sumbu Filosofi dalam pengelolaan warisan dunia ini. Kajian dilakukan dengan pendekatan Cultural Heritage Management. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, FGD, dan observasi terhadap sejumlah narasumber yang tinggal di kawasan Sumbu Filosofi. Hasil kajian menunjukkan pemahaman masyarakat cenderung dapat memahami makna Sumbu Filosofi dan upaya untuk melestarikannya, meskipun masih ada pula yang belum memahaminya dengan baik. Hal ini menunjukkan diseminasi mengenai nilai penting Sumbu Filosofi dan upaya pengelolaannya belum cukup efektif. Dari tingkat kesiapannya, masyarakat di Kawasan Sumbu Filosofi baru sampai pada tingkat awal atau inisiasi. Pada taraf ini masyarakat mengetahui dampak positif dari penetapan Sumbu Filosofi yang dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, mereka belum siap untuk benar-benar terlibat dalam pelestarian dan pengelolaannya. Karena itu, pemerintah harus mengoptimalkan kebijakan dan program pengelolaan Sumbu Filosofi agar tercipta sinergi antara pemerintah dan masyarakat.

**Kata Kunci:** *Sumbu Filosofi Yogyakarta; Cultural heritage management; Kesiapan masyarakat; Pengelolaan berkelanjutan*

## PENDAHULUAN

Sumbu Filosofi Yogyakarta telah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO sesuai dengan dokumen penetapan WHC 2345.COM 8B.39 pada tanggal 18 September 2023 (Humas DIY, 2023). Ditetapkannya Sumbu Filosofi Yogyakarta sebagai *world heritage* menuai pro dan kontra dalam masyarakat dikarenakan selama proses pengajuan Sumbu Filosofi Yogyakarta ke UNESCO sebagai *world heritage* oleh pihak Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Keraton Yogyakarta dinilai kurang memperhatikan unsur masyarakat, sehingga terkesan hanya ditujukan untuk mengejar pengakuan dunia semata. Hal tersebut dikuatkan dengan adanya kritik yang menyebutkan bahwa warga setempat yang paling dirugikan dan terpinggirkan atas kebijakan status *world heritage* (Susanto, 2022). Apabila tujuan utamanya adalah untuk menjaga eksistensi Sumbu Filosofi Yogyakarta, maka unsur masyarakat menjadi hal yang krusial, karena masyarakat menjadi salah satu penentu keberlanjutan sumbu filosofis sebagai warisan budaya pada masa kini dan masa depan.

Usulan pengajuan Sumbu Filosofi Yogyakarta sebagai warisan budaya dunia merupakan suatu gagasan mulai muncul pada tahun 2014, dan selanjutnya usulan diajukan dan diterima dalam *tentative list* (daftar usulan sementara) pada tahun 2017. Pada 2019 naskah usulan telah melalui proses *voluntary submission*. Proses pengajuan ditanggapi oleh World Heritage Committee UNESCO dengan visitasi oleh ICOMOS pada tahun 2022 dan akhirnya ditetapkan sebagai warisan budaya dunia pada tahun 2023. Konsep sumbu filosofis ini menurut UNESCO termasuk sebagai saujana asosiatif (*associative landscape*) yang merupakan perpaduan antara budaya bendawi (*tangible*) dan tak bendawi (*intangible*). Hal ini sejalan dengan *Outstanding Universal Value* (OUV) yang dimiliki oleh Sumbu Filosofi Yogyakarta. OUV merupakan signifikansi budaya dan/atau alam yang begitu luar biasa hingga melampaui batas-batas negara dan menjadi kepentingan bersama untuk generasi sekarang dan mendatang dari seluruh umat manusia (UNESCO, 2019). Sumbu filosofi Yogyakarta, menurut Pratiwi (2016), telah memiliki 3 dari 10 kriteria OUV UNESCO, yaitu: Merupakan mahakarya kecerdasan kreatif manusia (Kriteria I); menampilkan pertukaran nilai-nilai luhur manusia, dalam rentang waktu atau ruang lingkup budaya dunia, dalam arsitektur, teknologi, seni monumental, perencanaan kota, atau rancangan lanskap (Kriteria II); dan berkaitan baik secara langsung maupun tidak

langsung dengan peristiwa atau tradisi yang hidup, dengan gagasan, dengan kepercayaan, dengan karya seni dan sastra yang memiliki nilai pening universal yang menonjol (Kriteria VI).

Sumbu filosofi Yogyakarta diciptakan oleh Sultan Hamengku Buwono I ketika mendirikan pusat Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai hasil dari Perjanjian Giyanti atau Palihan Nagari pada tahun 1755. Menurut pihak Keraton Yogyakarta, sumbu filosofi ini merupakan gambaran manusia sejak dari lahir sampai meninggal. Dulunya konsep ini beraliran Hinduistis dan kemudian berganti menjadi filosofi Jawa Islam, yaitu "*Hayuning Bawana*" dan "*Manunggaling Kawula lan Gusti*". Woodward (1999) menjelaskan, tata ruang Yogyakarta beserta simbolisme dan arsitektur kratonnya menggambarkan struktur kosmos Islam dari Panggung Krapyak–Keraton–Tugu Golong-gilig sebagai penanda. Struktur ini memuat hubungan antara sufisme dan syariat serta asal-usul manusia yang disebut "*sangkan paraning dumadi*". Mengingat keunikan Sumbu Filosofi Yogyakarta yang sarat dengan makna di baliknya (*intangible*), maka diperlukan strategi khusus untuk dapat mempertahankan nilai-nilai tersebut. Dalam hal ini, masyarakat harus menjadi perhatian utama karena penetapan suatu kota menjadi warisan budaya dunia tanpa melihat sisi masyarakat untuk melakukan revitalisasi nilai-nilai kota itu adalah upaya yang cenderung sia-sia (Fajri, 2016). Dengan memberikan ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan, masyarakat dapat membantu mempertahankan nilai *intangible* suatu warisan budaya. Keterlibatan mereka dapat menumbuhkan ikatan emosional dan perasaan primordial masyarakat terhadap suatu warisan budaya (Mashuri, 2011). Untuk itu, penelitian ini bertujuan memahami persepsi masyarakat terhadap dijadikannya Sumbu Filosofi Yogyakarta sebagai warisan budaya dunia dan mencoba menilai kesiapan masyarakat dalam pengelolaannya secara berkelanjutan. Selain itu, akan dibahas juga strategi yang dapat diterapkan untuk mewujudkan pengelolaan Sumbu Filosofi Yogyakarta yang menekankan pada partisipasi masyarakat berdasarkan dengan konsep *Cultural Heritage Management* (CHM).

## METODE

### Subjek Riset

Subjek penelitian ini adalah masyarakat penduduk lokal yang tinggal di wilayah yang secara administrasi bersinggungan langsung dengan kawasan Sumbu Filosofi Yogyakarta dan telah tinggal di kawasan tersebut selama minimal 5 tahun. Daerah



tersebut terdiri atas enam kelurahan, yaitu: Cokrodiningratan, Gowongan, Sosromenduran, Suryatmajan, Panembahan, dan Kadipaten. Sampel masyarakat yang digunakan dalam penelitian ini merupakan tokoh masyarakat seperti, Ketua RW, Ketua RT, Kepala LPMK (Lembaga Pemberdaya Masyarakat Kelurahan), maupun masyarakat yang cukup memahami atau terlibat dalam persoalan diajukannya Sumbu Filosofi Yogyakarta sebagai *World Heritage*. Sampel yang diambil minimal berjumlah 1 orang pada masing-masing kelurahan. Kemudian, dari kriteria tersebut terdapat 6 total responden yang dapat diambil sampelnya untuk diwawancarai dan diundang untuk menjadi peserta *Focus Group Discussion* (FGD).

### **Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan menggunakan *purposive sampling*. Variabel dalam penentuan sampel adalah: masyarakat asli Yogyakarta, masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan Sumbu Filosofi Yogyakarta, dan mengetahui rencana pengajuan sumbu filosofi sebagai *world heritage*. Adapun metode pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara mendalam (*indepth interview*) dan *Focus Group Discussion* (FGD) terhadap sampel yang telah ditentukan. FGD dilaksanakan dengan tujuan (a) menggali lebih dalam seberapa jauh masyarakat memahami makna Sumbu Filosofi Yogyakarta, (b) bagaimana rencana masyarakat dalam pengelolaan warisan budaya tersebut, serta (c) untuk menyamakan persepsi antara peneliti dengan masyarakat sekitar Sumbu Filosofi Yogyakarta mengenai pengelolaannya. Pelaksanaan FGD dilakukan di Dinas Kebudayaan Yogyakarta, FGD mengambil sampel dengan kriteria masyarakat dari kelurahan yang telah diwawancarai sebelumnya berjumlah 6 orang dan mengundang staf dari Dinas Kebudayaan Yogyakarta berjumlah 1 orang sebagai moderator.

### **Metode Analisis Data**

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis *mixed methods* dan *cultural heritage management*. Tahap pertama dari analisis tersebut adalah menggunakan pendekatan *mix methods* model *concurrent embedded*. Pendekatan ini dilakukan dengan penggunaan data kuantitatif dan kualitatif secara bersama-sama atau berurutan, dimana salah satu data digunakan untuk menguatkan atau mendukung data yang lain (Azhari, *et al.*, 2023). Dalam penerapannya pada penelitian ini, data kuantitatif digunakan sebagai pendukung dari data kualitatif.

Langkah pertama dari analisis *mix methods* model *concurrent embedded*, yaitu menjadikan metode kualitatif menjadi data primer dengan pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* melalui proses pengumpulan data berupa metode wawancara dan FGD. Analisis data dilakukan dari transkripsi wawancara yang dibaca secara menyeluruh untuk mendapat pemahaman umum tentang keseluruhan yang disampaikan oleh responden. Setelah itu, pernyataan responden yang dianggap penting terkait persoalan Sumbu Filosofi ditandai atau digarisbawahi. Dari hasil proses itu, dapat dilakukan interpretasi data untuk memahami makna dibalik pernyataan responden yang kemudian dapat dikelompokkan ke dalam tema-tema yang dapat dikembangkan dengan deskripsi tematik yang rinci tentang fenomena tersebut. Pada tahap ini, penelitian mendapatkan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara. Hipotesis ini akan diuji secara kuantitatif pada tahap selanjutnya. Kemudian, langkah kedua dari *mixed methods*, yaitu melakukan analisis kuantitatif menggunakan pengukuran variabel berdasar teori indikator kesiapan masyarakat dari data kualitatif yang telah diperoleh sebelumnya. Tujuannya untuk melihat seberapa siap masyarakat untuk pengelolaan secara berkelanjutan Sumbu Filosofi Yogyakarta. Pengolahan data dengan statistik yang telah dipilih bertujuan untuk menguji kekuatan hipotesis yang telah dibuat sebelumnya.

Kemudian, penelitian menerapkan pendekatan *cultural heritage management* untuk melihat keterlibatan masyarakat sekitar dalam mengelola Sumbu Filosofi Yogyakarta secara berkelanjutan. Data yang digunakan persepsi masyarakat terhadap Sumbu Filosofi yang diperoleh dari wawancara dengan partisipan dan dipadukan dengan informasi yang terdapat dalam laporan pengelolaan dan kebijakan pelestariannya.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### **Analisis Persepsi Masyarakat Sekitar Kawasan Sumbu Filosofi Yogyakarta**

Sumbu filosofi Yogyakarta merupakan kekhasan daerah yang memiliki makna dalam tata nilai penataan ruang dan arsitektur (Perda DIY, 2011). Menurut Permono (2021), penataan kota Yogyakarta yang dipilih oleh Pangeran Mangkubumi (Sultan Hamengkubuwana I) sebagai ibukota Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, setelah ia menandatangani Perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755, merupakan perwujudan konsep *sangkan paraning dumadi*, yang membentang secara garis lurus dari Panggung Krapyak - Kraton - Tugu Yogyakarta. Secara garis besar,



konsep ini merupakan gambaran atau kisah hidup manusia dari lahir hingga meninggal. Konsep inilah yang menjadi nilai penting dan keunikan Sumbu Filosofi Yogyakarta. Melihat keunikannya yang tidak hanya terbatas pada kebendaannya saja, melainkan juga pada makna di baliknya (*intangible*), tentunya menjadi penting untuk melihat bagaimana ikatan emosional masyarakat terhadap Sumbu Filosofi Yogyakarta. Ikatan emosional inilah yang akan memunculkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap warisan budaya di sekitarnya dan menumbuhkan kesadaran untuk melindungi dan melestarikan situs (Sulistyanto, 2010). Tanpa masyarakat memahami dan merasakan makna dari Sumbu Filosofi Yogyakarta, maka Sumbu Filosofi hanya akan dikenal sebagai bangunan semata. Hal ini dikarenakan sejatinya masyarakat merupakan pemilik sah atas warisan budaya dan upaya perlindungan dan pelestarian suatu warisan budaya yang paling efektif dan efisien adalah ketika muncul kesadaran oleh masyarakat untuk dapat bertindak sebagai pelindung dan penjaga situs (Sulistyanto, 2010).

Persepsi masyarakat sekitar kawasan Sumbu Filosofi Yogyakarta tentunya sangat beragam dikarenakan setiap individu pasti memiliki sudut pandangnya tersendiri. Penelitian ini mencoba memetakan persepsi masyarakat terkait dengan hal-hal sebagai berikut: (a) pemahaman masyarakat terhadap Sumbu Filosofi Yogyakarta; (b) tanggapan masyarakat terhadap upaya dan kebijakan pemerintah untuk merevitalisasi Sumbu Filosofi Yogyakarta; dan (c) pemaknaan Sumbu Filosofi Yogyakarta dalam kehidupan masyarakat. Persepsi masyarakat pada penelitian ini dinilai dari jumlah masyarakat yang menjadi narasumber. Berdasarkan hasil wawancara, 4 dari 6 narasumber menilai masyarakat sudah cukup mengetahui esensi makna di balik Sumbu Filosofi Yogyakarta karena adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Di sisi lain, narasumber yang lain berpendapat saat ini masih cukup banyak masyarakat yang mengalami miskonsepsi antara Sumbu Filosofi dengan sumbu imajiner dan anak muda yang kebanyakan masih belum paham makna Sumbu Filosofi Yogyakarta.

Adanya upaya pemerintah dalam merevitalisasi Sumbu Filosofi Yogyakarta memunculkan beberapa tanggapan yang berbeda-beda dari masyarakat. Tiga orang narasumber menyatakan setuju dengan adanya revitalisasi tersebut dengan alasan melestarikan budaya Yogyakarta yang bertujuan melanjutkan sejarah untuk masa mendatang dan penataan yang lebih baik dan mengembalikan makna

keistimewaan Yogyakarta. Bahkan, mereka berpendapat bahwa masyarakat di sekitar Sumbu Filosofi Yogyakarta pun juga akan setuju dengan adanya revitalisasi karena dapat meningkatkan ekonomi di bidang pariwisata. Sementara itu, tiga narasumber lainnya merasa tidak setuju dengan revitalisasi yang dilakukan pemerintah karena lebih merugikan masyarakat dan belum adanya manfaat yang dapat dirasakan secara jelas. Selain itu, mereka berpendapat bahwa masyarakat merasa tidak mau menerima dampak dengan adanya revitalisasi, seperti relokasi.

Terdapat perbedaan pemaknaan Sumbu Filosofi Yogyakarta oleh masyarakat sekitar kawasan tersebut. Masyarakat menilai dampak dari adanya modernisasi, kalangan anak muda banyak yang tidak peduli pada nilai-nilai budaya Jawa yang terkandung dalam makna Sumbu Filosofi Yogyakarta sehingga mulai terkikis. Nilai budaya *unggah-ungguh*, misalnya, kini sudah mulai menghilang. Selain itu, Sumbu Filosofi Yogyakarta dinilai masih milik kraton karena masyarakat belum merasakan kegunaan dari keberadaan bangunan yang termasuk dalam Sumbu Filosofi Yogyakarta (Panggung Krapyak – Kraton – Tugu Yogyakarta) selain hanya sebagai objek pariwisata. Beberapa masyarakat, terkadang merasa sudah melaksanakan makna-makna yang terkandung dalam filosofi, tetapi tidak menyadarinya dan menganggap bangunan tersebut biasa saja.

### **Kesiapan Masyarakat untuk Terlibat dalam Pengelolaan Berkelanjutan**

Pengelolaan berkelanjutan dalam konservasi warisan budaya bertujuan untuk menjaga nilai warisan budaya tersebut dengan memperhatikan para pemangku kepentingan yang terlibat di dalamnya (Mason, 2002). Dalam menjaga nilai dari warisan budaya memerlukan uraian nilai yang lebih menyeluruh agar dapat menjadi satu kesatuan pemahaman. Perlakuan terhadap nilai tertentu, seperti ekonomi tidak boleh mendominasi karena dikhawatirkan merusak nilai warisan budaya dan membelakangkan nilai tersebut.

**Tabel 1.** Level kesiapan masyarakat

Skor Rata-rata	Level Kesiapan
1,00-1,99	Level 1, Tidak ada kesadaran ( <i>no awareness</i> )
2,00-2,99	Level 2, Penolakan ( <i>denial</i> )
3,00-3,99	Level 3, Kesadaran samar-samar ( <i>vague awareness</i> )
4,00-4,99	Level 4, Pra-perencanaan ( <i>preplanning</i> )



5,00-5,99	Level 5, Persiapan ( <i>preparation</i> )
6,00-6,99	Level 6, Inisiasi ( <i>initiation</i> )
7,00-7,99	Level 7, Stabilisasi ( <i>stabilization</i> )
8,00-8,99	Level 8, Konfirmasi/ekspansi ( <i>confirmation/expansion</i> )
9,00-10,00	Level 9. Profesionalisasi ( <i>professionalization</i> )

(Sumber : modifikasi dari Edwards, *et al.* 2000)

Untuk menetapkan level kesiapan masyarakat, penelitian ini menilai dengan jawaban dari pertanyaan oleh narasumber yang disusun berdasarkan dimensi kesiapan masyarakat sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2. Setiap jawaban dari narasumber akan dipetakan untuk melihat berapa jumlah narasumber yang memberikan jawaban positif pada setiap pertanyaan yang telah disusun. Skor pada tiap dimensi merupakan rata-rata dari indikator yang dihitung dalam skala 1-10.

**Tabel 2.** Dimensi Kesiapan Masyarakat

Dimensi	Indikator
Usaha komunitas	Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pelestarian sumbu filosofi Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pelestarian sumbu filosofi Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi pelestarian sumbu filosofi
Pengetahuan komunitas terhadap usaha	Memahami cara melibatkan diri dalam perencanaan pelestarian sumbu filosofi Memahami cara melibatkan diri dalam pelestarian sumbu filosofi Memahami cara melibatkan diri dalam evaluasi pelestarian sumbu filosofi
Kepemimpinan	Pemerintah daerah mendukung pengembangan masyarakat dalam pelestarian sumbu filosofi Tokoh masyarakat menjadi jembatan komunikasi terkait pelestarian sumbu filosofi antara masyarakat dan pemerintah Pemerintah menyediakan fasilitas dan pembiayaan untuk pelestarian sumbu filosofi
Iklim komunitas	Masyarakat memiliki sikap positif terhadap pelestarian sumbu filosofi Masyarakat mempunyai tanggung jawab terhadap keberhasilan pelestarian sumbu filosofi Sumbu filosofi bermanfaat bagi pemberdayaan masyarakat
Pengetahuan komunitas terhadap permasalahan	Memahami tujuan dan dampak pelestarian sumbu filosofi Memahami bahwa wilayahnya termasuk dalam kawasan yang terdampak pelestarian sumbu filosofi

	Memahami bahwa sumbu filosofi memiliki bagian dari pemasaran dan promosi wisata Kota Yogyakarta
	Meyakini SDM yang ada mencukupi bagi pengembangan dan pelestarian sumbu filosofi
Sumber daya terkait permasalahan	Meyakini pendanaan mencukupi untuk pengembangan dan pelestarian sumbu filosofi
	Meyakini SDA, budaya, dan sejarah berpotensi dalam pengembangan dan pelestarian sumbu filosofi
	Meyakini masyarakat mempunyai waktu yang cukup untuk berpartisipasi dalam pengembangan dan pelestarian sumbu filosofi

(Sumber : modifikasi dari Edwards, *et al.* 2000)

**Tabel 3.** Pemetaan jawaban narasumber

Dimensi	Jumlah narasumber dengan jawaban positif				Skor
	Indikator 1	Indikator 2	Indikator 3	Indikator 4	
Usaha komunitas	2/6	2/6	2/6		3,3
Pengetahuan komunitas terhadap usaha	4/6	3/6	4/6		6,1
Kepemimpinan	3/6	4/6	5/6		6,6
Iklm komunitas	3/6	4/6	3/6		5,5
Pengetahuan komunitas terhadap permasalahan	4/6	6/6	5/6		8,3
Sumber daya terkait permasalahan	3/6	5/6	5/6	5/6	7,5
<b>Skor rata-rata</b>					<b>6,21</b>
Tingkat kesiapan masyarakat					Inisiasi ( <i>Initiation</i> )

(Sumber : hasil pengolahan data, 2024)

Berdasarkan penilaian tersebut, masyarakat sekitar kawasan Sumbu Filosofi Yogyakarta berada pada level 6 kesiapan masyarakat, yaitu inisiasi (*initiation*). Edwards et al (2000) menyatakan pada level inisiasi ini sudah tersedia informasi yang cukup dan aksi sudah berlangsung, pelatihan staf, semangat besar pada pemimpin dan iklim komunitas bervariasi. Penjabaran dari pernyataan ini berdasarkan keadaan yang ada di lapangan adalah sebagai berikut:



a. Sudah tersedia informasi yang cukup dan aksi sudah berlangsung

Saat ini, informasi mengenai rencana pemerintah dan Kesultanan Yogyakarta terkait revitalisasi nilai-nilai Sumbu Filosofi Yogyakarta telah tersebar cukup luas. Informasi ini secara intens disampaikan melalui sosialisasi yang diselenggarakan untuk masyarakat dan bahkan untuk akademisi, dan telah dilaksanakan sejak bulan Juli 2023. Melalui sosialisasi ini, pemerintah dan Kesultanan Yogyakarta telah mencoba untuk mengembalikan pemahaman masyarakat tentang nilai penting Sumbu Filosofi Yogyakarta. Pemerintah dan Kesultanan Yogyakarta juga telah menetapkan kebijakan dan menyelenggarakan beberapa aksi untuk merevitalisasi Sumbu Filosofi Yogyakarta, seperti adanya relokasi PKL di Kawasan Malioboro dan mulai giat diadakannya kegiatan yang mengusung nilai budaya Yogyakarta, berupa penampilan budaya, pameran, serta adanya program wisata menyusuri Sumbu Filosofi Yogyakarta.

b. Ada pelatihan staf dan semangat besar pada pemimpin

Pelatihan staf dalam hal ini merupakan adanya pelibatan masyarakat dalam kelompok kerja teknis (pokjanis) kawasan Sumbu Filosofi Yogyakarta. Adanya keterlibatan masyarakat sebagai pokjanis secara tidak langsung menjadi wadah pelatihan bagi masyarakat untuk memahami apa saja hal yang harus diperhatikan dalam merevitalisasi kawasan Sumbu Filosofi Yogyakarta dan bagaimana cara menjaga nilai-nilai penting serta mengembangkan nilai tersebut agar dapat bertahan dan bermanfaat bagi masyarakat.

c. Iklim komunitas yang bervariasi

Adanya upaya pemerintah dan kesultanan Yogyakarta dalam merevitalisasi kawasan Sumbu Filosofi Yogyakarta menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat. Terdapat masyarakat yang setuju terhadap upaya pemerintah dikarenakan sudah seharusnya budaya Yogyakarta dilestarikan dan dijaga. Dengan adanya penataan pada kawasan Sumbu Filosofi Yogyakarta pun dirasa menjadikan Yogyakarta menjadi lebih rapi dan sebagaimana mestinya. Melalui Sumbu Filosofi Yogyakarta diyakini dapat meningkatkan pariwisata dan ekonomi. Namun, di sisi lain, terdapat masyarakat yang tidak setuju dengan cara-cara yang dilakukan pemerintah, terutama relokasi. Hal ini dikarenakan masyarakat menanyakan kenapa pemerintah tega melakukan relokasi secara masif. Selain itu,

kurangnya transparansi akan tujuan dan rencana pemerintah menjadikan masyarakat bersikap skeptis terhadap kebijakan ini.

### **Penerapan Cultural Heritage Management Pada Sumbu Filosofi Yogyakarta yang Melibatkan Masyarakat**

*Cultural Heritage Management* (CHM) dapat diartikan sebagai praktik pengelolaan warisan budaya secara sistematis yang berorientasi pada peraturan-peraturan yang diakui secara internasional yang memberikan perhatian untuk menjaga nilai-nilai budaya dari warisan budaya dengan memperhatikan keberlanjutannya (McKercher & du Cross, 2002: 43). Untuk dapat meningkatkan dan menjamin adanya pemeliharaan warisan budaya secara berkelanjutan, partisipasi masyarakat menjadi salah satu hal yang penting untuk diperhatikan. Hal ini dikarenakan masyarakat lokal adalah penjaga yang terbaik atas sumber daya warisan budaya yang ada di wilayah sekitar mereka, dan pemeliharaan warisan budaya tidak akan berhasil tanpa dukungan masyarakat lokal (Wells, 1992). Dalam pengelolaan Sumbu Filosofi Yogyakarta tentunya tepat apabila menggunakan prinsip CHM, dikarenakan keunikan yang terkandung pada Sumbu Filosofi Yogyakarta terdapat pada nilai *intangible*-nya yang berupa budaya, adat, dan tradisi, yang hanya bisa dihidupkan dengan dukungan dari masyarakat. Melalui adanya pemberian ruang untuk masyarakat berpartisipasi dalam pengelolaan dapat membantu mempertahankan nilai *intangible* suatu warisan budaya karena hal tersebut dapat menumbuhkan ikatan emosional dan perasaan primordial masyarakat terhadap suatu warisan budaya (Mashuri, 2011).

Berdasarkan pendapat beberapa peneliti, partisipasi publik dapat didefinisikan sebagai proses yang: “*memungkinkan masyarakat menyumbangkan gagasan dan keahliannya, sehingga pemerintah dapat membuat kebijakan yang sesuai dengan harapan masyarakat*” (Di Maio, 2010). Dalam penerapan CHM tetap diperlukan peran pemerintah untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan memperhatikan potensi yang sudah ada dalam masyarakat guna mengoptimalkan partisipasi publik di wilayah sekitarnya. Dalam hal ini, pengelolaan yang dapat dipelopori oleh Dinas Kebudayaan Yogyakarta haruslah didasarkan pada seberapa jauh potensi masyarakat yang dimiliki. Potensi itu dapat dikembangkan dengan arahan berupa: pengembangan kampung wisata yang pengembangannya berlandaskan pada nilai-nilai Sumbu Filosofi Yogyakarta; memaksimalkan masyarakat sekitar sebagai pelaku usaha di kawasan



Sumbu Filosofi Yogyakarta, tidak bergantung pada investor; dan mengoptimalkan sumber daya manusia masyarakat sekitar dalam acara kegiatan promosi budaya dan nilai Sumbu Filosofi Yogyakarta dengan meminimalisir keterlibatan *event organizer* yang bukan merupakan masyarakat sekitar. Hal tersebut, dapat menjadi rencana awal untuk membangun partisipasi publik agar masyarakat sekitar menguatkan rasa kepemilikan terhadap Sumbu Filosofi Yogyakarta meskipun banyak budaya yang masuk.

## KESIMPULAN

Sumbu Filosofi Yogyakarta memang memiliki keunikan sebagai cagar budaya yang mempunyai makna filosofis bernarasi *sangkan paraning dumadi* yang dapat dikatakan sebagai sumber daya *intangible*-nya. Dalam hal ini, keterlibatan masyarakat menjadi penting dikarenakan masyarakat lokal adalah penjaga yang terbaik atas sumber daya warisan budaya yang ada di wilayah sekitar mereka dan pemeliharaan warisan budaya tidak akan berhasil tanpa dukungan masyarakat lokal. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dapat ditafsirkan perihal persepsi dan kesiapan masyarakat sekitar Sumbu Filosofi Yogyakarta. Persepsi masyarakat dapat dipetakan dari tiga hal yaitu: 1) pemahaman masyarakat, 2) tanggapan masyarakat terhadap upaya dan kebijakan pemerintah untuk merevitalisasi, 3) pemaknaan dalam kehidupan. Sementara itu, kesiapan masyarakat dapat dilihat dari tiga indikator yaitu: 1) level kesiapan masyarakat, 2) dimensi kesiapan masyarakat, 3) pemetaan jawaban narasumber.

Pemahaman masyarakat sekitar Sumbu Filosofi Yogyakarta cenderung dapat memahami makna di balik bangunan tersebut dikarenakan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Namun, upaya sosialisasi tersebut dirasa kurang efektif dibuktikan dengan masih adanya masyarakat yang belum memahami makna Sumbu Filosofi. Sementara itu, adanya upaya pemerintah merevitalisasi Sumbu Filosofi Yogyakarta menjadikan dua kubu pro dan kontra pendapat masyarakat yang memiliki kuantitas sama dengan berlandaskan alasan ekonomi dan kerugian dari dampak relokasi. Hal ini menunjukkan masih minimnya komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat untuk menyatukan tujuan pengelolaan Sumbu Filosofi yang berkelanjutan. Selanjutnya, pemaknaan Sumbu Filosofi Yogyakarta oleh masyarakat sekitar cenderung tidak mengimplikasikan makna yang ada dalam bangunan tersebut di kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, mereka sekedar menganggap bangunan tersebut

sebagai objek pariwisata milik kraton yang maknanya semakin ditinggalkan oleh anak-anak muda seiring kemajuan zaman.

Berdasarkan analisis terhadap kesiapan masyarakat dalam pengelolaan berkelanjutan Sumbu Filosofi Yogyakarta, dapat dilihat bahwa sesungguhnya masyarakat di sekitar kawasan sumbu filosofi telah cukup memahami dampak dan tujuan akan adanya pelestarian sumbu filosofi, serta memahami bahwa sumbu filosofi menjadi bagian penting dalam pemasaran dan promosi wisata Kota Yogyakarta, yang secara tidak langsung nantinya dapat berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat. Akan tetapi, di sisi lain keterlibatan masyarakat dalam pelestarian Sumbu Filosofi masih kurang diperhatikan oleh pemerintah daerah. Karena itu, diperlukan adanya pengoptimalisasian rancangan kebijakan dan program dalam rangka pelestarian Sumbu Filosofi Yogyakarta yang diinisiasi oleh pemerintah daerah, namun tetap mempertimbangkan pandangan-pandangan masyarakat. Dengan demikian, akan dapat terjalin sinergi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat. Adanya keterlibatan masyarakat dalam pelestarian Sumbu Filosofi Yogyakarta dapat menguatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap warisan tersebut, sehingga akan mengamankan nilai pentingnya dalam era globalisasi.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang telah mendanai riset ini. Kemudian kepada masyarakat sekitar kawasan Sumbu Filosofi Yogyakarta, Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan seluruh *Civitas Akademika* Universitas Gadjah Mada serta pihak-pihak yang mendukung pelaksanaan riset.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, D.S., Z. Afif, & N. Sepriyanti. (2023). Penelitian *Mixed Method Research* untuk Disertasi. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(2), 8010-8025.
- Di Maio, A. (2010). *Gartner Group Government Maturity Model*. Stanford: Gartner Group.
- Edwardds, R.W., P.J. Thruman, B. A. Plested, E.R. Oetting, & L. Swanson. (2000). The community readiness model: Research to practice. *Journal of Community Psychology*, 28(3), 291-307.
- Fajri, A. (2016). Menyoal Kesiapan Yogyakarta menjadi The World Heritage City. *MAYANGKARA: Bulletin Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya*, 2, 291-307.



- Humas DIY. (2023). Sah, Sumbu Filosofi Yogyakarta Jadi Warisan Budaya Dunia. Diunduh dari <https://jogjaprovo.go.id/berita/sah-sumbu-filosofi-yogyakarta-jadi-warisan-budaya-dunia>.
- Mashuri. (2011). Konsep Pelestarian Pusaka Sujana di Kawasan Lembah Bada. *Majalah Ilmiah "Mektek"*, 13(1), 23-30.
- McKercher, B. & Du Cross, H. (2002). *Cultural tourism: the partnership between tourism and cultural heritage management*. New York: The Haworth Hospitality Press.
- Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. (2011). Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta. Yogyakarta
- Permono, A. (2021). Sangkan Paraning Dumadi Sumbu Filosofi Yogyakarta: Dalam Lensa Fenomenologi-Hermeneutika. *Nun*, 7(1), 163-208.
- Pratiwi, D.L. (2016). Yogyakarta City of Philosophy: Pemerintah Daerah DIY dalam Mewujudkan Yogyakarta sebagai Warisan Dunia. *MAYANGKARA: Bulletin Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya*, 2, 10-13
- Sulistiyanto, B. (2010). Pemberdayaan Masyarakat di Lingkungan Situs Arkeologi. *AMERTA: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Arkeologi*, 28, 1-16.
- Susanto, H. (2022). LBH Jogja Rilis Film Kritik Pengajuan Sumbu Filosofi Jadi Warisan Dunia. Diunduh dari <https://www.detik.com/jateng/jogja/d-6254614/lbh-jogja-rilis-film-kritik-pengajuan-sumbu-filosofi-jadi-warisan-dunia>.
- Woodward, M.R. (1999). *Islam Jawa Kesalehan Normatif Versus Kebatinan*. Yogyakarta: LkiS Yogyakarta.
- Wuisan, C.E.V., J. Rengkung, & D.M. Rondonuwu. (2016). Pelestarian Lansekap Budaya Indonesia: Mendokumentasikan Lansekap Vernakular Etnis Minahasa di Wilayah Pedesaan Pesisir Pantai Kecamatan Kema, Sulawesi Utara. *Media Matrasin*, 13(3), 26-41.